



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENGATURAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AREAL (ACFTA) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

SKRIPSI



SRI OKTAVIANI
07940222

**FAKULTAS KEKHUSUSAN HUKUM
INTERNASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NO. REG. 38 /PK VII / IV /2011

**PENGATURAN PERDAGANGAN BEBAS
DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AREAL (ACFTA)
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

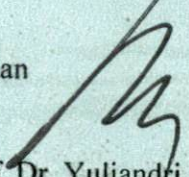
Oleh:

SRI OKTAVIANI

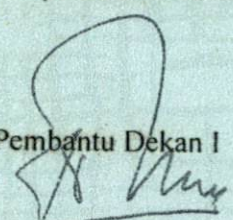
07 940 222

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan sidang komprehensif dan dinyatakan **LULUS** pada hari Rabu, Tanggal 27 April, Tahun 2011 oleh tim penguji yang terdiri dari:

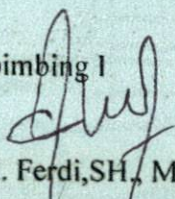
Dekan


Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH
NIP. 196207181988101001

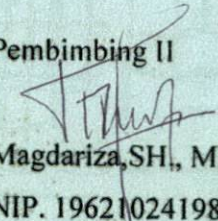
Pembantu Dekan I


Yoserwan, SH., MH., LLM
NIP. 196212311989011002

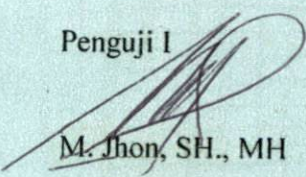
Pembimbing I


Dr. H. Ferdi, SH., MH
NIP. 196807231993021001

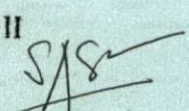
Pembimbing II


Magdariza, SH., MH
NIP. 196210241989012002

Penguji I


M. Jhon, SH., MH
NIP. 195708071987021001

Penguji II


Sri Asih Roza Nova, SH., MH
NIP. 197211272001122001

PENGATURAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* (ACFTA) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

(Sri Oktaviani, 07940222, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri, Halaman 58, 2011)

ABSTRAK

Perdagangan Bebas adalah suatu model hubungan jual beli di dunia hukum internasional. Perdagangan bebas artinya perdagangan yang tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor suatu barang. Perangkat hukum internasional yang mengatur tentang perdagangan bebas terdapat dalam dokumen *Final Act Agreement on WTO* yang memuat aturan hukum internasional. Pelaksanaan perdagangan bebas dalam *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) di Indonesia secara regulasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, sebagaimana telah diratifikasi, membentuk peraturan perundangan yang berkaitan dengan ACFTA (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004). Adapun beberapa permasalahan yang diangkat adalah: Apa saja tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA, bagaimanakah implementasi ACFTA di Indonesia, dan apa saja kendala-kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur dan buku-buku referensi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA merupakan sarana untuk mempermudah hubungan negara dalam melakukan perdagangan internasional serta dapat meningkatkan daya saing antar pelaku usaha dalam kawasan perdagangan bebas, dengan pembebasan hambatan-hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non tarif sebagaimana yang diamanatkan dalam GATT/WTO dalam rangka mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional. 2) Implementasi ACFTA di Indonesia dari segi regulasi telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Assocation of South east Asean Nations and the People's Republic of China* dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). 3) Kendala implementasi ACFTA di Indonesia adalah infrastruktur yang berbelit-belit dan lemahnya IPTEK dalam meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional.

FREE TRADE ARRANGEMENTS WITHIN THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

(Sri Oktaviani, 07940222, Specification of Programme : International Law,
Faculty of Law, Andalas University, Page 58, 2011)

ABSTRACT

Free trade is a policy carried out by the government to not discriminate against the import and export of goods. International legal instruments governing trade between countries is contained in document GAAT/WTO which includes free trade policy within the confines of the rule of law. Implementation of free trade within the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) in Indonesian as a regulation in accordance with the provisions stipulated in the framework agreement on comprehensive economic cooperation between the association of south east Asian nations and the people's Republic of China, as has been ratified, forming laws and regulations relating to the ACFTA (Republic of Indonesia presidential decree number 48 year 2004). As for some of the problems raised was: What is the implementation of free trade within the ACFTA framework, how the implementation of ACFTA in Indonesia, and what the constraints in the implementation of the ACFTA in Indonesia. Method used is the normative approach. In this study, the authors use the legislation, literature and reference books. Based on the results of research conducted by the author concluded that: 1). The implementation of free trade within the ACFTA framework is a means to facilitate the relationship between the state in conducting international trade and increase competitiveness among businesses in the Free Trade Area with the liberation of trade barriers in the form of tariff and non tariff as mandated in the GATT/WTO in order to encourage the activities of international trade traffic. 2). Implementation of the ACFTA in Indonesia in terms of regulations are in accordance with the provisions of international law and has ratified the decision of the President Republic of Indonesia number 48 year 2004 concerning the ratification of the framework agreement on comprehensive economic cooperation between the association of south east ASEAN nations and the people's Republic of China and regulations of the Republic's finance minister Indonesia 235/PMK.011/2008 number dated 23 december 2008 concerning the establishment of tariff within the framework of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). 3). Constraints ACFTA implementation Indonesia is the infrastructure convoluted and weak science and technology in improving competitiveness in free trade.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENGATURAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* (ACFTA) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**.

Salawat beriring salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke dalam kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga umat manusia dapat berfikir dan beramal untuk keselamatan dunia dan akhirat. Adapun tujuan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar kesarjanaan di Bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Dari lubuk hati yang terdalam, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada kedua orang tuaku yang tercinta, **Papaku Syafri dan Mamaku Ratnawati** yang dengan tulus memberikan segala perhatian, kasih sayang dan doa yang tidak putus-putusnya, serta untuk setiap tetesan keringat yang dikeluarkannya untuk mendidik dan membesarkan anakmu ini. Semoga ALLAH SWT dapat membalas setiap pengorbanan yang kalian berikan kepadaku, AMIN.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH (PJ) selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, SH., MH., LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH., MH selaku Pembantu Dekan II, Bapak Dr. Kurnia warman, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan III.
2. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri dan Ibu Arfiani, SH., MH selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. H. Ferdi, SH., MH selaku Ketua bagian Hukum Internasional sekaligus selaku Pembimbing I dan Ibu Delfianti, SH., MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna penulisan skripsi ini ke arah yang lebih baik.
4. Ibu Magdariza, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan petunjuk serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berguna selama penulis dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

6. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu dalam proses administrasi bagi penulisan skripsi ini.
7. Semua kakak-kakak dan adek-adek yang telah memberikan dorongan dan semangat serta inspirasi yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2007 khususnya yang berada di lokal III, teman-teman program kekhususan hukum internasional yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini tidak lepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan berupa saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ini di masa mendatang. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Amin.....

Padang, April 2011

SRI OKTAVIANI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perdagangan Bebas Dalam Kerangka Hukum Perdagangan Internasional

1. Perdagangan Dalam Masyarakat Internasional	15
2. Perdagangan Bebas Sebagai Bagian Dari Perdagangan Internasional	23

B. *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)*

1. Latar Belakang <i>ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)</i>	31
2. Pengaturan <i>ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)</i>	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perdagangan Bebas Dalam Kerangka ASEAN	39
B. Implementasi ACFTA di Indonesia	46

C. Kendala Dalam Implementasi <i>ASEAN-China Free Trade Area ACFTA</i> di Indonesia	48
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang dengan menetapkan bahwa, hukum dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum menjadi landasan hidup dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.¹

Dengan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, maka dapat tercipta suatu tatanan kehidupan yang mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Sehingga segala sesuatu yang akan dilakukan oleh aparatur pemerintahan, dapat diatur dalam aturan-aturan hukum yang mengikat kehidupan seluruh masyarakat yang berada pada suatu tatanan kehidupan masyarakat hukum.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan hukum biasanya disebut sebagai kepastian hukum dan keadilan. Tujuan lain dari hukum misalnya dalam hal tata tertib, suasana damai, suasana aman, sejahtera, keadilan sosial, dan lain-lain. Dengan kata lain, tujuan hukum itu untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut, misalnya tata keadilan sosial, tata tertib, tata keamanan, tata ekonomi, tata kesejahteraan sosial, dan lain-lain.²

¹ Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 1

² Daliyo, J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm 2

Hukum Indonesia, juga mengatur tentang perdagangan atau perniagaan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya. Perdagangan bebas mengacu pada pentingnya kekuatan pasar terbatas dan persaingan sehat dalam menentukan keseimbangan kekuasaan antara pihak yang bertransaksi. Perdagangan bebas berhubungan langsung dengan isu-isu seperti tarif, pergerakan bebas tenaga kerja dan modal antar negara, pajak, subsidi dan hukum serta peraturan yang berdampak perdagangan bebas.

Dalam perdagangan bebas, Indonesia telah menetapkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hukum perdagangan bebas. Hukum perdagangan bebas adalah suatu aturan-aturan hukum, kaedah-kaedah hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya dalam perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi global yang bersifat bebas sesuai dengan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku.³

Kawasan perdagangan bebas telah diatur dalam *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) adalah kawasan perdagangan bebas yang mencakup seluruh batas negara-negara anggota ASEAN, dimana pada tahun 2003 yang lalu, arus lalu lintas barang dagangan, uang pembayaran dan faktor penunjang pelaksana AFTA lainnya dari negara-negara anggota akan bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN.⁴

³ Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 5

⁴ Anwar, Chairul, *Hukum Perdagangan Internasional*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999, hlm 42

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2000 tanggal 1 September 2000 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 mengatakan bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.⁵

Sebuah kawasan perdagangan bebas atau zona pemerisesean ekspor adalah satu atau beberapa negara, dimana bea dan quota dihapuskan serta kebutuhan akan birokrasi direndahkan dalam rangka menarik perusahaan-perusahaan dengan menambahkan insentif untuk melakukan usaha disana.⁶

Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Secara umum, perdagangan internasional berkembang ke arah perdagangan yang lebih luas, bebas, dan terbuka. Negara-negara secara bilateral, regional, maupun global cenderung mengadakan kerja sama dalam bentuk penurunan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif.⁷

Hal itu dilakukan untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif dan progresif. Dewasa ini, negara melakukan penguasaan yang luas terhadap urusan ekonomi. Konsekuensinya adalah mengharuskan negara untuk terlibat langsung dalam menjalin hubungan kerja sama khususnya di

⁵ Perdagangan Bebas, Setio Pamungkas, www.google.com, alinea 3, diakses tgl 3 januari 2011, jam 19.00 WIB

⁶ Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 123

⁷ Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. ALUMNI, Bandung, 2003, hlm 117

bidang ekonomi dengan negara lain. Oleh karena itu, instrumen hubungan antar negara pada umumnya adalah perjanjian internasional, yang mengharuskan negara untuk membuat suatu perjanjian internasional bilateral maupun multilateral di bidang ekonomi. Hal ini bertujuan, agar tidak ada salah satupun yang merasa dirugikan, karena telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁸

Kebijakan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang cenderung difokuskan pada perkembangan sistem ekonomi internasional dan perkembangan perekonomian negara lain. Hal itu perlu dilakukan, mengingat semua faktor ikut mempengaruhi dan menentukan perekonomian nasional, baik secara langsung atau tidak langsung.

Sejak tahun 1980-an, Indonesia telah mengatur derap pembangunan ekonomi dengan semaksimal mungkin, yang melibatkan upaya ekspor sebagai roda penggerak dan motivator pembangunan nasional. Dalam hal ini, keberhasilan ekonomi dan perdagangan dalam negeri sangat dipengaruhi oleh kondisi yang ada di luar negeri. Dengan demikian, keberhasilan sistem ekonomi luar negeri suatu negara akan menentukan proses pembangunan nasional. Hal ini berguna untuk mendukung pembangunan nasional ke arah yang lebih baik.

Dalam hal ini, Indonesia ditempatkan pada posisi yang potensial dalam melakukan perdagangan, yaitu dengan cara mempertahankan dan memperluas pasar serta mengeliminasi hambatan-hambatan (*barriers*) ekspor. Indonesia selalu berupaya untuk menjaga agar aturan dan segala produk hukum dalam sistem

⁸ Narsif, 2008, Diktat, *Hukum Ekonomi Internasional*, Padang, hlm 13

perdagangan dan ekonomi internasional, tidak bersifat memihak dan diskriminatif sehingga negara-negara maju tidak dapat memaksakan kehendaknya secara sepihak yang dapat merugikan negara-negara yang sedang berkembang.

Apalagi di era liberalisasi, perdagangan dalam lingkup globalisasi ekonomi dunia, menyatukan berbagai macam negara dalam satu wilayah atau kawasan pasar yang sangat luas dan tak batas (*borderless*). Fakta menunjukkan bahwa negara-negara di dunia saling membutuhkan. Dibiidang ekonomi, tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Apalagi di era globalisasi saat ini, ketergantungan satu negara kepada negara lain semakin tinggi. Dimana semua negara dituntut untuk saling interpendensi antara satu dengan yang lainnya. Semua negara diwajibkan untuk melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Dalam melakukan hubungan ekonomi internasional, dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang hubungan ekonomi internasional, berupa organisasi ekonomi internasional dan perjanjian multilateral. Hukum ekonomi internasional berfungsi untuk mengatur hubungan ekonomi agar tidak saling merugikan. Selain itu, perlu dijaga ketertiban hubungan ekonomi antara para pelaku. Hukum ekonomi internasional, diharapkan dapat melindungi kepentingan berbagai pihak dan lebih menjamin adanya kepastian hukum.

Sejak abad ke-19, Pemerintah Indonesia telah bekerjasama untuk menciptakan organisasi internasional yang mengatur peningkatan hubungan ekonomi antar negara, sekaligus menetapkan beberapa perjanjian multilateral di

bidang ekonomi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk para pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya di bidang ekspor dan impor.

Dalam dunia internasional, terdapat organisasi internasional yang bergerak pada aspek ekonomi internasional yang meliputi; perdagangan, investasi, pembangunan dan moneter. Masing-masing organisasi tersebut menetapkan perjanjian multilateral yang mengikat anggota dan memiliki pengaruh yang sangat luas baik terhadap negara, perusahaan maupun individu.⁹

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ASEAN juga ikut memberikan partisipasi dalam melakukan perdagangan secara internasional, khususnya dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, agar tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif baik perdagangan yang dilakukan secara bilateral maupun secara multilateral.

The Association of South East Asian Nations (ASEAN) didirikan dengan *the Bangkok Declaration of 1967* dan beranggotakan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. ASEAN telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu organisasi regional yang cukup besar dengan sepuluh negara anggota, yang dikenal dengan sebutan Sepuluh Besar atau "*the big ten*".¹⁰

Perkembangan anggota ASEAN menjadi sepuluh negara, membuat organisasi regional ini sangat berperan penting di Kawasan Asia Pasifik, karena pertumbuhan dan kinerja ekonominya yang kuat dan mempunyai potensi untuk lebih meningkatkan besaran *gross domestic product* (GDP). Organisasi regional

⁹ Narsif, 2008, Diktat, *Hukum Ekonomi Internasional*, Padang, hlm 17

¹⁰ Husin, Sukanda, *Hukum Lingkungan Internasional*, CV. Witra Irzani, Riau, 2009, hlm 56

ASEAN didirikan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan perdagangan bebas.

Negara-negara Asia Tenggara, membentuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-IV. AFTA bertujuan sebagai liberalisasi perdagangan regional Asia Tenggara sejalan dengan tujuan GATT/WTO yang berorientasi pada perdagangan bebas.¹¹

Sebuah terobosan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat regional adalah dengan membentuk komunitas perdagangan bebas, yakni antara negara-negara yang tergabung di ASEAN dengan China melalui perjanjian *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA). ACFTA ini menimbulkan suatu perkembangan baru pada kegiatan perdagangan internasional, terutama pada kawasan Asia Tenggara. Kesiapan menyambut dampak positif dan negatif dari terselenggaranya ACFTA, menjadi problematika tersendiri yang menarik untuk dicermati terutama di negara Indonesia sebagai salah satu subyek hukum internasional yang memiliki potensi *comparative advantage*.

Investasi ke dalam dan ke luar negeri dalam konteks ACFTA merupakan peluang yang memiliki dua sisi yang berlawanan, menjanjikan dan justru merugikan. Indonesia dengan segala potensinya dihadapkan pada sebuah tantangan untuk dapat bertahan dan meningkatkan posisinya di dalam perdagangan dan investasi. Namun bagi masyarakat di Indonesia, muncul pro-

¹¹ Implementasi Pengaturan AFTA di dalam Hukum Nasional Indonesia, Prawiryo Setiawan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Zona>, alinea 4, diakses tgl 23 februari 2011, jam 20.00 WIB

kontra tentang kemampuan dan kematangan hukum investasi di Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas versi ACFTA ini.

Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007, serta Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN, pada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Oleh karena telah disahkannya ACFTA secara formal, maka Indonesia perlu untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam ACFTA.

Pemberlakuan ACFTA di Indonesia banyak memiliki sisi positif dan negatif bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha. Berbagai usaha telah banyak dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan hubungan kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan negara lain, terutama dalam hal masuknya perdagangan bebas di Indonesia dalam versi *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Untuk lebih efektifnya peningkatan perekonomian di Indonesia, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul, **"PENGATURAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu.

1. Apakah tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA?
2. Bagaimanakah implementasi ACFTA di Indonesia?
3. Apa saja kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal untuk mendukung judul dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu.

1. Untuk mengetahui tujuan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA
2. Untuk mengetahui implementasi ACFTA di Indonesia
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah.

1. Manfaat Praktis

Untuk melatih penulis dalam mengembangkan segala pemikiran dan wawasan berfikir dalam suatu karya ilmiah, khususnya dalam hal tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA, implementasi ACFTA di Indonesia dan kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi para pihak

Untuk memberikan masukan agar para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan, tentang tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA, implementasi ACFTA di Indonesia dan kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia.

b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan gambaran yang lebih jauh kepada masyarakat tentang tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA, implementasi ACFTA di Indonesia dan kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab masalah yang akan diteliti tersebut, maka diperlukan beberapa metode yang akan digunakan dalam penulisan penelitian mengenai tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA, implementasi ACFTA di Indonesia dan kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia, yaitu.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara normatif, yaitu suatu penelitian hukum dimana penulis mempelajari dan mengkaji permasalahan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat internasional dan mempelajari implementasinya di Indonesia.

2. Sumber dan Jenis Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder. Sumber data diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan perdagangan bebas dalam ACFTA.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa rancangan undang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia umum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil bahan-bahan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui penelitian kepustakaan (*Library reseach*) pada.

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universits Andalas Padang. Disamping itu, untuk melengkapi data juga dilakukan penelusuran data melalui internet.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang diperoleh, penulis menggunakan analisa data kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan pengaturan perdagangan bebas dalam ACFTA. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian proposal ini lebih terarah dan teratur, maka penulis merasa sangat perlu memberikan sistematika penulisan. Adapun sistematikanya dalam penulisan proposal ini akan dibagi dalam 4 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum mengenai perdagangan bebas dalam kerangka hukum internasional yang terdiri dari perdagangan dalam masyarakat internasional dan perdagangan bebas sebagai bagian dari perdagangan internasional. Selain itu juga terdapat latar belakang tentang ASEAN-China *Free Trade Area* dan pengaturan tentang ASEAN-China *Free Trade Area*.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan menjelaskan dan membahas mengenai permasalahan yang penulis kemukakan yaitu tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA, implementasi ACFTA di Indonesia dan kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Pada bagian bab penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan tentang apa yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dan penulis akan memberikan saran-saran yang dianggap perlu. Selain itu penulis juga akan mencantumkan beberapa daftar kepustakaan yang berkaitan dengan proposal yang penulis ajukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perdagangan Bebas Dalam Kerangka Hukum Perdagangan Internasional

1. Perdagangan Dalam Masyarakat Internasional

Menurut Schmitthof,¹² hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang bersifat perdata, aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang dilakukan oleh negara-negara. Jika dilihat dari pengertian Michelle Sanson,¹³ ia mengatakan bahwa perdagangan internasional di bagi dalam dua aspek yaitu aspek privat dan aspek publik, sedangkan Hercules Booyesen¹⁴ lebih melihat hukum perdagangan internasional sebagai aturan-aturan hukum yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan

¹² Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 4.

¹³ *Ibid*, hlm 9.

¹⁴ *Ibid*, hlm 10.

pemerintah negara lain. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi dan kehadiran perusahaan multinasional.

Tujuan hukum perdagangan internasional adalah untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil, menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Tujuan utama harmonisasi hukum, hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada.¹⁵ Selain itu, perdagangan internasional juga bermanfaat dalam berbagai aspek yang turut menjadi pendukung utama dalam mencapai sesuatu yang diinginkan oleh masing-masing negara. Adapun manfaat yang terdapat dalam perdagangan internasional adalah sebagai berikut.

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya sendiri.
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang

¹⁵ *Ibid*, hlm 31.

sama jenisnya dengan produksi negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara itu mengimpor barang tersebut ke luar negeri.

3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan alat produksinya dengan maksimal, karena khawatir akan terjadi kelebihan yang mengakibatkan turunnya harga produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan alat produksinya secara maksimal dan dapat menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri.
4. Transfer teknologi modern perdagangan luar negeri, memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern untuk perkembangan teknologi di negeri sendiri.

Hukum perdagangan internasional, awalnya lahir dari praktik para pedagang. Pada awal perkembangan ini, *lex mercatoria* tumbuh dari adanya empat faktor antara lain¹⁶ lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya (*the law of the fairs*), lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut, lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktik penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan, berperannya notaris (*public notary*) dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum (dagang).

¹⁶ *Ibid*, hlm 24.

Badan-badan atau organisasi internasional di bidang unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional adalah¹⁷ *World Trade Organization* (WTO), *The International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT), *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), Kamar Dagang Internasional (ICC).

Sebelum lahirnya perjanjian perdagangan regional, dunia internasional sudah menyepakati perjanjian perdagangan multilateral yaitu GATT. Dalam ketentuan GATT sendiri, telah mengatur tentang diperbolehkannya pembentukan perjanjian perdagangan regional dengan syarat tidak mengganggu proses liberalisasi perdagangan dan kompetisi bebas. Perjanjian perdagangan regional didasarkan pada pemberian preferensi kepada negara-negara anggotanya yang terdapat dalam Pasal 24 GATT. Tujuan dari Pasal ini adalah untuk menghilangkan hambatan perdagangan, namun apabila tindakan ini dilakukan tanpa batas, maka kekhawatiran sebagian pihak tentang perjanjian perdagangan regional akan merusak sistem perdagangan multilateral.

Kekhawatiran tersebut dapat diselesaikan melalui putusan *GATT Council on Differential and Favourable Treatment (Enabling Clause)* pada tahun 1979. Dalam paragraf 2 (c) dinyatakan bahwa, apabila negara berkembang melakukan tindakan preferensi, maka ia wajib untuk melaksanakan ketentuan GATT tentang *Most Favoured Nation* (MFN).

¹⁷ *Ibid.* hlm 36-47.

Perjanjian perdagangan regional, tidak hanya meliputi perdagangan barang saja. Dalam *General Agreement on Trade and Services* (GATS) pasal V juga ditentukan mengenai kebebasan untuk membuat perjanjian perdagangan jasa regional, dengan syarat tidak boleh melanggar ketentuan dan prinsip yang di atur dalam GATS.

Kecenderungan seperti ini, dapat membahayakan perjanjian perdagangan multilateral. Berdasarkan pendapat beberapa pakar, perjanjian perdagangan regional harus ditempatkan sebagai pelengkap perjanjian perdagangan multilateral. Argumen yang diajukan adalah; (1) perjanjian perdagangan regional merupakan tahap awal terbentuknya liberalisasi perdagangan. Dengan adanya sistem preferensi, diharapkan berlakunya tindakan *Most Favoured Nation* (MFN). (2) tidak adanya persyaratan yang ketat dalam GATT/WTO tentang perjanjian perdagangan regional, yang memberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk-bentuk perjanjian.

Kebebasan yang diberikan oleh GATT/WTO dalam membentuk perjanjian perdagangan regional, merupakan sebuah pengakuan bahwa potensi keberhasilan dalam kerangka regional lebih ampuh ketimbang multilateral. Sebab, jika pengaturan tentang pembentukan perjanjian perdagangan regional dilakukan secara ketat, maka kegagalan untuk menciptakan pasar dan kompetisi bebas akan benar-benar terjadi. Perjanjian perdagangan regional dapat dianggap sebagai ajang latihan berjenjang bagi negara-negara yang secara ekonomi belum mapan untuk membebaskan pasar domestiknya secara multilateral.

Meskipun jaminan kebebasan dalam membuat perjanjian perdagangan regional sudah dijamin oleh GATT/WTO, nampaknya masih terdapat keseragaman materi khas yang dicantumkan dalam perjanjian perdagangan regional. Dalam melakukan suatu perdagangan di lingkup internasional, terdapat aturan-aturan atau prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan oleh para pihak yang terkait dalam proses perdagangan. Prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*) dalam hukum perdagangan internasional adalah.

a. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak¹⁸

Prinsip dasar kebebasan berkontrak meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait, kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya dan kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak tersebut. Dalam prinsip ini, para pihak diharapkan melakukan suatu kontrak dengan adanya iktikad baik yang kemudian hari tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

b. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*¹⁹

Prinsip *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan iktikad baik). Dengan adanya prinsip ini, maka para pihak yang melakukan kontrak dengan pihak lain, dengan

¹⁸ *Ibid*, hlm 15.

¹⁹ *Ibid*, hlm 16.

sendirinya ia akan terikat dengan kontrak yang dibuat, sehingga memiliki akibat hukum jika terjadi suatu pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati.

c. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase²⁰

Alasan penggunaan arbitrase dijadikan prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

“Moreover, to the extent that the settlement of differences is referred to arbitration, a uniform legal order is being created. Arbitration tribunals often apply criteria other than those applied in courts. Arbitrators appear more ready to interpret rules freely, taking into account customs, usage and business practice. Further, the fact that the enforcement of foreign arbitral awards is generally more easy than the enforcement of foreign court decisions is conducive to a preference for arbitration.”

(“Selain itu, untuk penyelesaian sengketa disebut dengan arbitrase, dibuat sebuah tatanan hukum yang seragam. Arbiter siap untuk menafsirkan aturan bebas, dengan memperhatikan kebiasaan, penggunaan dan praktek bisnis. Selanjutnya, fakta menunjukkan bahwa penegakan putusan pengadilan internasional adalah konduktif untuk preferensi arbitrase”).

Dengan adanya forum penyelesaian sengketa dagang secara internasional, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa dagang melalui badan arbitrase yang telah diakui secara internasional.

²⁰ *Ibid*, hlm 16.

d. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)²¹

Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak dalam berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik melalui darat, laut, udara atau melalui sarana elektronik. Dengan adanya prinsip ini, maka dapat mempermudah para pihak dalam melakukan kontrak dagang kepada pihak lain baik secara nasional maupun secara internasional.

Subjek hukum perdagangan internasional adalah para pelaku (*stakeholders*) dalam perdagangan internasional, yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan dan para pelaku yang mampu untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Subjek perdagangan internasional adalah.

1. Negara²²

Negara menjadi subjek hukum yang paling penting dalam hukum perdagangan internasional. Hal ini disebabkan karena negaralah satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan.

2. Organisasi Internasional²³

Organisasi internasional juga penting dalam hukum perdagangan internasional, karena organisasi internasional lebih banyak mengeluarkan

²¹ *Ibid*, hlm 17

²² *Ibid*, hlm 58.

²³ *Ibid*, hlm 64.

peraturan-peraturan yang bersifat rekomendasi, dimana aturan tersebut langsung ditujukan pada negara yang bersangkutan.

3. Individu²⁴

Individu menjadi subjek hukum dalam perdagangan internasional, karena individulah yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan, sehingga seluruh hak dan kewajiban ditanggung oleh pihak-pihak dalam perdagangan internasional.

Dalam perdagangan internasional, terdapat sumber-sumber hukum yang menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan perdagangan. Yang termasuk dalam sumber hukum perdagangan internasional adalah perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan pengadilan dan doktrin, kontrak, serta hukum nasional.

2. Perdagangan Bebas Sebagai Bagian Dari Perdagangan Internasional

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada *Harmonized Commodity Description and Coding System* dengan ketentuan dari *World Customs Organization* yang berpusat di Brussels, Belgium. Perdagangan bebas dalam arti luas adalah arus barang dan jasa bebas melewati batas negara.²⁵ Perdagangan bebas, juga dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan yang

²⁴ *Ibid*, hlm 68.

²⁵ AK, Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006 hlm22.

diterapkan pemerintah, dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Perdagangan internasional, sering kali dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semula hambatan-hambatan inilah yang di tolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang di dukung oleh penganut perdagangan bebas ini, justru menciptakan hambatan baru dalam terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena banyak melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar dan mengenyampingkan kepentingan perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah.

Pengaturan perdagangan regional (*regional trading arrangements*), merujuk pada suatu kelompok negara yang sepakat untuk menghilangkan atau mengurangi rintangan-rintangan terhadap impor dari sesama anggotanya. Hal ini telah berlangsung di beberapa region dunia, seperti ME (sekarang *European Union*) dengan konsep pasar tunggalnya, ASEAN dengan AFTA-nya, dan lain-lain. GATT dalam Pasal XXIV, mengakui adanya integrasi yang erat dalam bidang ekonomi melalui perdagangan yang lebih bebas.²⁶

²⁶ Adolf, Huala, A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta 1994, hlm 20.

Oleh karena itu, GATT mengakui pengelompokan-pengelompokan tersebut sebagai suatu pengecualian dan aturan umum klausul MFN. Namun pengelompokan tersebut juga ada syaratnya, yaitu bahwa pengelompokan itu harus dibuat dengan maksud untuk mendorong perdagangan diantara negara-negara tersebut, tanpa menimbulkan rintangan-rintangan perdagangan terhadap negara ketiga. Dengan demikian, integrasi regional seperti itu harus berfungsi sebagai pelengkap bagi sistem perdagangan multilateral dan bukan sebagai ancaman terhadapnya.

Pengelompokan-pengelompokan regional menurut Pasal XXIV GATT dapat berupa *custom union* atau *free trade area*. Dalam dua bentuk pengelompokan tersebut, bea (*duties*) dan rintangan-rintangan lain terhadap semua perdagangan harus dihilangkan. Dalam suatu *free trade area*, setiap anggota tetap menjalankan kebijaksanaan perdagangan eksternalnya, termasuk tarif terhadap non anggota. Dalam suatu *custom union*, negara anggota melaksanakan bea tarif yang seragam terhadap negara yang bukan anggotanya. Dengan demikian, maka setiap negara dapat merasakan perlakuan yang sama dengan negara lainnya.

Dalam rangka akomodasi kepentingan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) dan berdasarkan isi perjanjian dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, sebagaimana telah diratifikasi membentuk peraturan perundangan yang berkaitan dengan ACFTA, yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008

tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan respon bagi pemberlakuan ACFTA di kawasan perdagangan bebas. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut berkaitan erat dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berlaku bagi investor asing dan investor dalam negeri. Pemberlakuan ACFTA pada sisi lain, menyebabkan munculnya pesimisme di bidang perekonomian. Indonesia sendiri merasa keberatan dengan pemberlakuan perdagangan bebas dengan China terutama di bidang tekstil, besi-baja, petrokimia, dan barang-barang elektronik. Dalam bidang-bidang tersebut, pembebasan tarif (bea masuk), pemerintah dituntut untuk melakukan penundaan terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan, untuk mencegah kerugian sekaligus memberikan perlindungan yang cukup bagi pelaku usaha di bidang tersebut.

Selain itu, penundaan terhadap pembebasan tarif (bea masuk) diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pelayanan yang lebih baik untuk produk-produk dalam negeri yang ditawarkan. Perkembangan ekspor dan impor antara kedua negara dalam kerangka perdagangan bebas ACFTA, menjadi titik tolak pengaturan hukum investasi. Hal ini bertujuan agar investasi China tidak merugikan kepentingan pengusaha baik besar ataupun kecil.

Secara legal maupun ilegal, produk China telah menjadi salah satu pesaing utama bagi produk-produk buatan dalam negeri. Maka, daya saing menjadi taruhan utama dalam menentukan kebijakan hukum investasi yang tepat. Kebijakan ini mengandung kepentingan untuk melindungi kepentingan investasi di Indonesia, karena pemerintah harus memperhatikan beberapa hal, yakni.²⁷

- a. Biaya untuk mengurus kontainer di pelabuhan masih tinggi, itupun belum ditambah dengan biaya parkir yang di nilai memberatkan para pengusaha.
- b. Biaya pemungutan liar (pungli) minimal 7,5 % dari biaya ekspor.
- c. Masalah struktural yang dihadapi industri kita belum tuntas digarap secara serius, karena lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi, rendahnya produktivitas tenaga kerja industri, belum terintegrasinya UMKM dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan skala besar, kurang sehatnya iklim persaingan karena banyaknya subsektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati “monopoli” dan masih terkonsentrasinya lokasi industri di pulau Jawa dan Sumatera.
- d. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian perlu menyelamatkan produk Indonesia yang lemah daya saingnya.

²⁷ Perdagangan Bebas, Setio Pamungkas, www.google.com, alinea 7, diakses tgl 3 januari 2011, jam 19.00 WIB

Indonesia dihadapkan pada suatu problem hukum investasi, dimana batasan-batasan nasionalisme dengan investasi asing menjadi bias. Hukum investasi Indonesia harus dijadikan patokan, agar China tidak mengenyampingkan persoalan nasionalisme kebangsaan, sekaligus menjadi pijakan utama dalam pertumbuhan ekonomi.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur mengenai tata cara investasi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh investor asing maupun investor dalam negeri. Dengan demikian, investor China diharuskan untuk tunduk pada undang-undang tersebut. ACFTA sendiri tidak hanya menyebabkan integrasi perekonomian dikawasan perdagangan bebas, namun kerjasama untuk membangunnya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia melalui kebijakan investasi dalam memperkuat perekonomian dalam negeri.

Perdagangan bebas dalam batas-batas nasional di beberapa negara, masih terbilang baru. Jean Baptiste Colbert mencoba untuk menghapuskan hambatan perdagangan internal di Perancis, namun tidak tercapai sampai terjadinya Revolusi Perancis. Di Inggris, istilah perdagangan bebas pertama kali digunakan untuk menghilangkan hak istimewa perusahaan. Pada abad ke-18 perdagangan bebas akhirnya datang, yang ditandai dengan munculnya kebijakan tarif moderat dalam perdagangan internasional. Pesatnya pertumbuhan industri Inggris di akhir tahun 1700-an, memberikan kekuatan terhadap pembatasan perdagangan internasional. Adam Smith *Wealth of Nations* (1776) memberikan dasar intelektual yang kuat untuk gerakan perdagangan bebas tersebut.

Setelah Perang Dunia I, Inggris memperkenalkan kembali sistem perlindungan dan preferensi untuk membangun perekonomian. Pada pertengahan tahun 1930-an, Amerika Serikat menandatangani perjanjian perdagangan timbal-balik dengan pemerintah asing, dengan alasan untuk menstabilkan kondisi ekonomi dan politik negara tersebut. Pada saat ini, Amerika merupakan negara yang memiliki tarif rendah dalam perdagangan.

Setelah Perang Dunia II, perlindungan terhadap tarif mendukung terciptanya perdagangan bebas. Hasil dari perjanjian perdagangan internasional tersebut berupa Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (1948), *Benelux Economic Union* (1948), Masyarakat Ekonomi Eropa (*Common Market*, 1957), Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (1959), *Mercosur* (1991), dan Organisasi Perdagangan Dunia (1995). Pada tahun 1993, *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) disetujui oleh pemerintah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pada awal tahun 1990, bangsa Uni Eropa menghapus semua hambatan dalam dunia perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas, secara teoritis perdagangan bebas dapat menguntungkan negara berkembang sepanjang waktu. Perdagangan bebas mengacu pada pentingnya kekuatan pasar dan persaingan sehat dalam menentukan keseimbangan kekuasaan antara pihak yang bertransaksi. Perdagangan bebas berhubungan dengan isu-isu seperti tarif, pergerakan bebas tenaga kerja dan

modal antar negara, pajak, subsidi, hukum dan peraturan yang berdampak pada perdagangan bebas.²⁸

Organisasi Perdagangan Dunia diciptakan untuk membuka pasar, mempromosikan perdagangan bebas internasional dan menghilangkan hambatan untuk berdagang. Kebijakan perdagangan bebas, sering dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam intervensi perdagangan, dengan penekanan pada kewirausahaan dan investasi.²⁹

Kawasan Perdagangan Bebas di negara ASEAN, pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri Thailand yang bernama Panyarachun Anand. Pada bulan Januari 1992, anggota ASEAN menandatangani Deklarasi Singapura yang merupakan penciptaan AFTA. Hasil dari perjanjian tersebut adalah program penurunan tarif yang komprehensif di wilayah perdagangan bebas, dan dilaksanakan secara bertahap di tahun 2008. AFTA mulai beroperasi secara penuh pada tanggal 1 Januari 2003.

Kawasan perdagangan bebas atau zona pemrosesan ekspor adalah satu atau beberapa negara, dimana bea masuk dan kuota dihapuskan, serta kebutuhan akan birokrasi direndahkan, tentunya dalam rangka menarik perusahaan-perusahaan dengan menambahkan insentif untuk melakukan usaha disana. Biasanya, kawasan perdagangan bebas ini ditetapkan dibagian wilayah atau negara yang kurang berkembang, karena kawasan tersebut dapat menarik para

²⁸ AK, Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006 hlm 17.

²⁹ *Ibid*, hlm 98.

pengusaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta stimulasi ekonomi di wilayah tersebut. Kaasan ini, sering kali digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mendirikan pabrik-pabrik dalam memproduksi barang .

B. Tinjauan Umum Tentang *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA)

1. Latar Belakang *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* (ACFTA)

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. ASEAN didirikan di Bangkok, pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang dihadiri oleh negara-negara anggota diantaranya; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Adapun yang mewakili negara dalam Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand). Pada tanggal 8 Januari 1984, negara Brunei masuk menjadi anggota ASEAN. Pada tanggal 28 Juli 1995 dan tanggal 23 Juli 1997 Laos dan Myanmar menjadi anggota ASEAN. Prinsip

utama ASEAN adalah menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara, hak setiap negara untuk memimpin negara tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota dan penyelesaian sengketa dengan jalur damai.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan, dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan sebuah perjanjian perdagangan yang dibuat oleh Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara yang mendukung manufaktur lokal di semua negara ASEAN. Perjanjian AFTA ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. Pada awal ditandatangani perjanjian AFTA, ASEAN memiliki enam anggota yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Pada tahun 1995 Vietnam bergabung dengan AFTA, setelah itu diikuti oleh Laos dan Myanmar pada tahun 1997 dan Kamboja pada tahun 1999. Saat ini AFTA terdiri dari sepuluh negara anggota di ASEAN. Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN.

Sebuah terobosan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat regional adalah membentuk komunitas perdagangan bebas, yakni antara negara-negara yang tergabung di negara ASEAN dengan China melalui perjanjian *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA). ACFTA ini menimbulkan suatu perkembangan baru dalam kegiatan perdagangan internasional, terutama pada kawasan Asia Tenggara. Problematika yang muncul kemudian adalah konteks kesiapan Indonesia dalam ACFTA, tentunya dalam menyediakan sarana keteraturan di bidang hukum investasi. Dengan dibukanya pintu perdagangan bebas versi ACFTA ini, Indonesia diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Tujuan utama diselenggarakannya ACFTA adalah.³⁰

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif, meningkatkan perdagangan barang dan jasa, menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.
3. Menggali bidang-bidang kerjasama baru dan mengembangkan kebijakan dengan tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para negara anggota ASEAN baru seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam-CLMV,

³⁰ Perdagangan Bebas, Setio Pamungkas, www.google.com, alinea 10, diakses tgl 3 januari 2011, jam 19.00 WIB

serta menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.

2. Pengaturan ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

Kesepakatan pembentukan perdagangan bebas ACFTA diawali oleh para peserta ASEAN-China Summit di Brunei Darussalam pada November 2001 . Hal ini diikuti dengan penandatanganan Naskah Kerangka Kerjasama Ekonomi (*The Framework Agreement on A Comprehensive Economic Cooperation*) oleh para peserta ASEAN-China Summit di Pnom Penh pada November 2002, dimana naskah ini menjadi landasan bagi terbentuknya ACFTA dengan suatu fleksibilitas kepada negara tertentu seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.

Dalam perkembangannya selanjutnya, ACFTA diluncurkan pertama kali pada saat ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement*, 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Jasa yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah perdagangan jasa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan Republik Rakyat China yang dilakukan dalam rangka ACFTA. Begitu juga dengan penyelesaian sengketa, dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa, maka akan diselesaikan menurut aturan hukum internasional yang berlaku.

Dalam rangka akomodasi kepentingan ACFTA tersebut dan berdasarkan isi perjanjian dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the*

People's Republic of China, sebagaimana telah diratifikasi membentuk peraturan perundangan yang berkaitan dengan ACFTA, diantaranya; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China *Free Trade Area*.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, dijelaskan bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 di Cebu, Filipina, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian ini sebagai hasil perundingan antara wakil negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China.³¹

Jika dilihat dari *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, telah tertera bahwa ACFTA ini berlaku bagi negara-negara Asia Tenggara (Indonesia) dan China. Hal ini dapat terlihat dalam perjanjian ini yang terdiri dari 23 Pasal.

³¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

Pada Pasal 1 perjanjian ini terdapat definisi yang tertuju pada WTO, GATT 1994, ASEAN, Negara-negara anggota ASEAN, yang menerapkan tarif MFN dan termasuk didalamnya kuota tarif. Pasal 2 yang menjelaskan tentang perlakuan nasional untuk produk-produk dari negara lain. Pada pasal 3 tentang pengurangan dan penghapusan tarif sesuai dengan ketentuan yang ada pada prinsip MFN. Pada Pasal 7, aturan ini tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam WTO. Pada Pasal 8 disebutkan bahwa masing-masing pihak tidak melakukan pembatasan kuantitatif kecuali diizinkan oleh WTO.³²

Jika dilihat dalam Pasal 9 tentang tindakan pengamanan mengatakan bahwa suatu pihak harus memiliki hak untuk melakukan tindakan terhadap produk dalam masa transisi sesuai dengan ketentuan WTO. Pada Pasal 14 dilihat pula tentang Status pengakuan Ekonomi Pasar China mengatakan bahwa masing-masing dari 10 negara anggota ASEAN setuju untuk mengakui China sebagai pelaku penuh dalam ekonomi pasar dan berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini pada bagian 15 dan 16 ayat 242 Protokol Akses Republik Rakyat China yang ditujukan pada WTO sehubungan dengan perdagangan antara China dan sepuluh negara anggota ASEAN.³³

³² Persetujuan tentang *Ekonomi Komprehensif Perdagangan Barang* antara Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China

³³ *Ibid.*

Pada Pasal 21 tentang penyelesaian sengketa, dijelaskan bahwa mekanisme tentang penyelesaian sengketa antara ASEAN dan China akan berlaku untuk perjanjian ini menurut aturan hukum internasional. Pada Pasal 23 mengatakan bahwa persetujuan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.³⁴

Jika dilihat pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China *Free Trade Area*, pengaturan tentang ACFTA ini terdapat dalam Pasal 1 sampai Pasal 5 yang menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara China untuk tahun 2009-2012.³⁵

Dengan disepakatinya ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) pada Januari 2010, membuat banyak pihak khususnya pengusaha kecil dan menengah khawatir. Para pengusaha mulai khawatir produk-produknya tidak dapat bersaing dengan produk-produk buatan China. Jangankan para pengusaha yang bermodal besar dengan jaringan yang luas serta memiliki pasar yang lebih tertata, para petani pun merasakan dampaknya karena barang-barang buatan China jauh lebih murah jika dibandingkan dengan barang-barang buatan dalam negeri.

Ditambah lagi dengan perilaku konsumen yang lebih mementingkan gengsi dari pada gizi. Faktanya, kebanyakan masyarakat akan memilih buah dan makanan impor karena dianggap lebih bergengsi. Maka akan semakin terpuruklah

³⁴ *Ibid*

³⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.

pedagang kecil dan produsen pangan lokal. Dampak ACFTA bagi perekonomian bangsa ini memang luar biasa. Efeknya akan membuat perekonomian nasional secara makro maupun mikro menjadi terpuruk.

Ketika persaingan bebas digelar, maka para produsen akan berlomba-lomba menekan biaya produksi demi mendapatkan harga murah.³⁶ Biaya produksi banyak dipangkas baik dari ongkos buruh, pengurangan bahan baku dan menurunkan kualitas barang. ACFTA pada dasarnya hanyalah memindahkan sampah dari negeri orang ke negeri kita. Dan itu ancaman serius yang paling nyata terhadap lingkungan hidup bangsa ini. Apabila tidak mampu dikendalikan dan tidak ditindaklanjuti secara baik dan serius, maka dapat dipastikan produsen dalam negeri tidak mendapat apa-apa, alias gagal di negara sendiri karena tidak mampu bersaing. Maka jangan heran apabila negeri ini terkenal dengan negeri para konsumen. Fakta memang demikian, yang dibutuhkan adalah keseriusan dan mencari jalan keluar yang terbaik, jangan sampai negeri ini dijajah dari segi ekonomi.

³⁶ AK, Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006 hlm 119.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Pengaturan Perdagangan Bebas Dalam ACFTA

Perdagangan bebas (*free trade*) sebagai pengaruh dari globalisasi ekonomi internasional, merupakan suatu kebijakan dalam bentuk liberalisasi perdagangan. Hal ini didasarkan pada konsep teoritis yang mengandalkan berlakunya sistem perdagangan internasional serta bebas dari hambatan, baik yang disebabkan oleh tarif (*tariff barriers*) maupun non-tarif (*non tariff barriers*).³⁷

Banyak para ekonom yang berpendapat bahwa, perdagangan bebas meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lagi berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, serta membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju, karena menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain, dan juga menyebabkan standar hidup serta keamanan lebih rendah. Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk saling bersaing antara yang satu dengan yang lainnya baik dari segi kualitas, kuantitas dan harga barang.

³⁷ *Ibid*, hlm22.

Untuk itu, negara memberlakukan tarif supaya barang-barang yang di impor tidak begitu mudah masuk ke dalam industri lokal. Tarif adalah bea atau cukai atau pajak yang dikenakan terhadap barang yang di transportasikan dari suatu daerah pabean ke daerah pabean lainnya. Penerapan tarif bertujuan untuk memperoleh pendapatan bagi negara atau memproteksi barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan non-tarif atau hambatan non-tarif adalah ketentuan pemerintah selain daripada tarif yang secara efektif membatasi impor atau ekspor, atau ketentuan lainnya. Perdagangan bebas memberikan manfaat, baik kepada negara maupun kepada masyarakat.

A. Untuk Negara China dan Indonesia³⁸

1. Terciptanya suatu iklim perdagangan yang baru bagi Indonesia dan China dalam hal perdagangan barang
2. Terjalannya kerjasama yang baru dibidang ekonomi khususnya dalam perdagangan bebas
3. Dapat meningkatkan daya saing antar produk lokal dengan produk luar negeri (China) sehingga produsen lokal berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produknya supaya laku dipasaran baik dari segi kualitas maupun harga barang.

³⁸ Implementasi Pengaturan AFTA di dalam Hukum Nasional Indonesia, Prawiryo Setiawan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Zona>, alinea 7, diakses tgl 23 february 2011, jam 20.00 WIB

B. Untuk Negara dan masyarakat Indonesia³⁹

1. Mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. Dengan adanya kawasan perdagangan bebas, maka masyarakat yang berada di kawasan perdagangan bebas, berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga pengangguran dan angka kemiskinan pada kawasan perdagangan bebas tersebut dapat dikurangi.
2. Peningkatan pendapatan dan pajak selain dari pajak yang bebas. Pada kawasan perdagangan bebas ini, setiap produk barang yang berada pada kawasan perdagangan bebas akan dikenakan tarif sehingga bisa menambah pendapatan selain dari pajak barang.
3. Peningkatan devisa melalui peningkatan nilai ekspor dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan adanya kawasan perdagangan bebas, maka devisa negara akan meningkat, dengan adanya wisatawan asing yang ikut bergabung pada kawasan perdagangan bebas, otomatis mereka akan melakukan kunjungan yang dapat menjadi inkam masuk bagi masyarakat dan negara.
4. Terciptanya kesempatan dan peluang kerja. Bagi masyarakat yang berada pada kawasan perdagangan bebas, memiliki peluang yang sangat besar, dimana para pelaku maupun investor akan banyak membutuhkan tenaga

³⁹ Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, nazar aditia, <http://id.wikipedia.org>, alinea 4, diakses tgl 10 Maret 2011, jam 20.00 WIB

kerja dan tentunya bisa mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.

5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan kerja. Semakin banyak produk yang diperdagangkan pada kawasan bebas, maka akan semakin menguntungkan bagi para pekerja, dimana mereka dapat mengambil keuntungan sekian persen dari setiap jenis barang. Kesejahteraan kerja ini, juga merujuk pada kesejahteraan hidup para karyawannya tentu melalui gaji, tunjangan yang cukup, dan asuransi kesehatan (kecelakaan kerja). Dengan adanya jaminan tersebut, otomatis kesejahteraan akan terwujud dengan sendirinya.
6. Kesempatan bekerja dan berusaha. Untuk masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, maka disinilah mereka harus membuktikan kelebihan dan keterampilan yang mereka miliki. Banyak karya yang dapat diciptakan, tergantung dari keinginan dan keyakinan akan usaha itu sendiri.
7. Peningkatan SDM melalui alih teknologi. Semakin ketatnya persaingan usaha dalam perdagangan, maka diharapkan masyarakat khususnya para pelaku usaha dapat meningkatkan SDM dan melakukan alih teknologi untuk meningkatkan kualitas dalam situasi pasar bebas. Ini penting, karena kualitas barang merupakan patokan utama, selain dari pada harga. SDM inilah yang harus terus diasah jika tidak, maka akan sangat mustahil dapat

bersaing dengan produk asing yang jauh lebih bagus, baik dari segi kemasan maupun dari segi kualitas (isi).

8. *Multiflier effect* seperti hidupnya bisnis perumahan dan koperasi-koperasi karyawan, dan lain-lain. Selain usaha perdagangan yang dilakukan pada kawasan perdagangan bebas, maka masyarakat setempat dapat membuka usaha diluar bidang perdagangan dengan cara memanfaatkan lahan mereka untuk dijadikan bisnis perumahan yang dirasa lebih menguntungkan. Pada dasarnya, setiap pelaku usaha, akan membutuhkan tempat (lokasi) yang tepat untuk melakukan usahanya. Disilah masyarakat yang memiliki lahan, dapat bernegosiasi dengan para investor sehingga terciptalah suatu kesepakatan berupa kerjasama antara sipemilik dengan sipembeli.

Ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dalam pembentukan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) adalah GATT sebagai sebuah perjanjian internasional. GATT diberlakukan melalui *Protocol Of Provision Application* pada tahun 1947 yang menjadi salah satu legitimasi dalam hukum ekonomi internasional. Tujuan dari GATT sendiri adalah menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di bidang penanaman modal, lapangan kerja dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat.

Berpijak dari tujuan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, GATT telah meletakkan kerangka dasar dalam pembentukan perdagangan bebas dalam *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) seperti yang tertera dalam Pasal

XXIV GATT. Selain itu, ternyata WTO juga terkait dengan pembentukan *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*. WTO (*World Trade Organization*) adalah sebuah organisasi internasional yang merupakan tindak lanjut atas penyempurnaan GATT melalui putaran Uruguay.⁴⁰

Dengan dibentuknya WTO, semakin menambah keyakinan negara di dunia bahwa sistem perdagangan bebas sudah tidak dapat dihindarkan lagi. WTO sebagai organisasi internasional mendukung sistem perdagangan dan perekonomian dunia menuju kearah yang semakin terbuka, berdasarkan aturan secara multilateral dan diberlakukan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika dikaitkan dengan perdagangan bebas dalam *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, dapat dijelaskan bahwa ACFTA merupakan suatu alternatif yang memberikan peluang untuk terciptanya perdagangan internasional dan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap negara tanpa diskriminasi. Berdasarkan perjanjian WTO, pada prinsipnya suatu negara tidak diperbolehkan mendiskriminasi negara lain. Semua anggota WTO harus diperlakukan sama sebagai *Most Favoured Nation (MFN)*. Prinsip MFN ini terdapat dalam tiga perjanjian utama WTO, yaitu GATT (*The General Agreement on Tariff and Trade*), GATS (*The General Agreement on Trade in Service*) dan TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property rights*).

⁴⁰ Adolf, Huala, A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta 1994, hlm 20.

Dalam kerangka perdagangan ASEAN, AFTA juga ikut serta dalam pelaksanaan perdagangan bebas versi ACFTA. AFTA yang disepakati oleh negara-negara ASEAN, merupakan bentuk liberalisasi perdagangan regional Asia Tenggara yang sejalan dengan tujuan GATT/WTO.⁴¹ AFTA merupakan suatu persetujuan kerja sama ekonomi regional, yang ikut serta mendukung penghapusan hambatan-hambatan perdagangan dalam terciptanya perdagangan bebas ASEAN terutama dalam ACFTA.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa, perjanjian atau konvensi adalah sebagai salah satu sumber hukum ekonomi internasional yang ikut memberikan legitimasi dalam pembentukan perdagangan bebas *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Hal-hal yang dikemukakan di atas merupakan pijakan dasar, mengapa Indonesia menjadi pasar yang potensial bagi perkembangan ekonomi kawasan. Pemberlakuan ACFTA, menuntut Indonesia memberikan fasilitas yang memadai seperti yang dijanjikan dalam substansi perjanjiannya. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dikemukakanlah tiga hal yang merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, paling tidak dalam pemberlakuan ACFTA ke depan antara Indonesia dan China.

⁴¹ Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004 hlm 131

B. Implementasi *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) di Indonesia

Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian ACFTA dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. Dan kemudian secara berturut-turut terjadi perkembangan negosiasi dimana secara formal, ACFTA diluncurkan pertama kali pada saat ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement*, 29 November 2004 di Vientiane, Laos.

Kemudian Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sementara itu, Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN, tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Karena telah disahkannya ACFTA secara formal, maka Indonesia perlu untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang dijanjikan dalam ACFTA, dimana pada pokoknya dalam 10 tahun akan dikuatkan kerjasama ekonomi antara China dan ASEAN dengan melakukan berbagai strategi yang diharapkan dapat menguatkan kerjasama ekonomi tersebut.⁴²

⁴² Sejarah Berdirinya ASEAN, Hasibuan, <http://h45ibuan.blogspot.com>, alinea 4, diakses tgl 15 Maret 2011, jam 19.00 WIB

ACFTA merupakan sarana bagi peningkatan investasi di Indonesia, yang memberikan dorongan agar di Indonesia dilakukan pembaharuan hukum investasi, jika memungkinkan maka akan dilakukan perubahan-perubahan seperlunya yang dapat mengakomodir kepentingan investasi di Indonesia. GATT, WTO, dan beberapa konvensi internasional lainnya, menjadi sumber hukum ekonomi internasional yang memberikan peluang kepada setiap negara untuk menciptakan suatu perdagangan bebas sebagai salah satu sarana yang menunjang aktifitas perdagangan internasional.

Penciptaan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas di beberapa wilayah Indonesia merupakan bentuk konsistensi Indonesia terhadap konsep perdagangan global. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadapi fenomena global perdagangan bebas.

Dalam rangka akomodasi kepentingan ACFTA tersebut, dan berdasarkan isi perjanjian dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, sebagaimana telah diratifikasi membentuk peraturan perundangan yang berkaitan dengan ACFTA, yakni: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008

tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China *Free Trade Area*.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan bagian dari hukum investasi, dimana Indonesia hendak memberikan respon bagi pemberlakuan ACFTA di kawasan perdagangan bebas. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut berkaitan erat dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berlaku bagi investor asing dan investor dalam negeri.⁴³ Tentunya dengan melakukan berbagai strategi yang diharapkan dapat menguatkan kerjasama ekonomi tersebut.

C. Kendala Dalam Implementasi ACFTA di Indonesia

Hambatan Perdagangan adalah salah satu dari sejumlah pembatasan pada perdagangan antar negara. Yang sebagian besar hambatan perdagangan adalah subsidi, tarif, kuota, tugas, dan embargo. Perdagangan bebas merujuk pada penghapusan teoritis dari semua hambatan perdagangan. Dalam prakteknya, tidak ada bangsa yang sepenuhnya mencakup perdagangan bebas, karena semua bangsa memanfaatkan berbagai macam hambatan perdagangan untuk keuntungan mereka sendiri.

Kebijakan negara merupakan hambatan utama dalam setiap perdagangan. Kebijakan negara mengenai perdagangan hampir selalu ditempatkan pada proses ekspor dan impor. Secara historis, kebijakan negara Indonesia dalam bidang

⁴³ Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004 hlm 116

perdagangan merupakan sumber utama dalam hukum di Indonesia. Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Hambatan-hambatan perdagangan diantaranya.⁴⁴

1. Kebijakan negara Indonesia dalam melakukan perdagangan khususnya dalam hal perdagangan barang pada kawasan perdagangan bebas.
2. Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga.
3. Subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain.
4. Muatan lokal.
5. Peraturan administrasi.
6. Peraturan antidumping.

Hambatan perdangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea masuk.

⁴⁴ Adolf, Huala, A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta 1994, hlm 12

Kebijakan perdagangan bebas dibentuk oleh pemerintah nasional. Meskipun koalisi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia berupaya untuk memecahkan masalah-masalah perdagangan, tetapi hambatan terhadap perdagangan bebas masih ada. Kegagalan kebijakan perdagangan bebas mungkin menjadi masalah nasional atau internasional.

Dalam jangka panjang, pelaksanaan perdagangan bebas akan membawa manfaat berupa arus investasi yang lebih lancar, perdagangan yang lebih luas serta skala ekonomi yang sedemikian besar sehingga menghasilkan alokasi sumber daya yang rasional dan meningkatnya efisiensi. Namun dalam jangka pendek, ternyata perdagangan bebas juga dapat menimbulkan masalah bagi negara yang kurang siap untuk bersaing khususnya dalam bidang perdagangan.

Selain kendala-kendala yang disebutkan diatas, masih ada lagi kendala-kendala dalam melakukan perdagangan bebas dalam ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) yaitu disharmonisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadapi persaingan global perdagangan bebas. Dalam penerapan Undang-Undang tersebut, ternyata masih terdapat perbedaan penafsiran, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Bea Masuk yang masih diberlakukan di seluruh wilayah kesatuan Indonesia termasuk wilayah diluar pabean.

Jika Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 diberlakukan pada wilayah perdagangan bebas, dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan para investor yang menginvestasikan modalnya dalam kawasan tersebut, karena didalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat ketentuan yang saling bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, terhadap investor ditawarkan keringanan-keringanan berupa pembebasan penggunaan Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai. Namun di sisi lain, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 masih tetap diberlakukan.

Dengan dibukanya pintu perdagangan bebas versi ACFTA ini, Indonesia diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi investor untuk memasukkan modalnya ke Indonesia. Kemudahan ini menjadi ukuran pasti dikarenakan telah lama Indonesia dianggap oleh investor merupakan negara yang berpotensi, namun memiliki hambatan di bidang hukum investasinya terutama persyaratan-persyaratan yang sangat ketat sehingga rentan terhadap munculnya penyimpangan-penyimpangan.

Kendala investasi di Indonesia yang umum terjadi misalnya seperti, pengurusan izin yang terlalu bertele-tele, perilaku negatif birokrasi, pembatasan bidang usaha, kelemahan infrastruktur yang mendukung investasi, dan belum terciptanya kepastian hukum, penegakan hukum serta fasilitas perpajakan. ACFTA yang merupakan sarana bagi peningkatan investasi di Indonesia,

memberikan dorongan agar Indonesia melakukan pembaharuan hukum investasi yang memungkinkan dilakukan perubahan-perubahan seperlunya yang dapat mengakomodir kepentingan investasi di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan mencoba memberikan beberapa kesimpulan sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Disamping itu, penulis juga memberikan saran yang berguna sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

A. Kesimpulan

Dalam perspektif hukum ekonomi internasional, perdagangan bebas bukanlah tujuan, tetapi merupakan suatu sarana untuk mempermudah hubungan antara negara-negara dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional, dengan pembebasan hambatan-hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non tarif, sebagaimana yang diamanatkan dalam GATT/WTO dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia internasional.

Dalam beberapa BAB yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Pada hakekatnya, tujuan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Dalam pelaksanaan perdagangan bebas dalam konsep ACFTA ini, terkandung prinsip hukum ekonomi internasional. Prinsip pertama adalah *Most Favoured Nation* (MFN) yang

berarti suatu negara harus memberikan perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor serta ekspor tanpa syarat (non diskriminasi). Prinsip berikutnya adalah *National Treatment* yang mewajibkan suatu negara untuk memberi perlakuan yang sama baik itu terhadap barang, jasa, ataupun modal yang dimiliki oleh perusahaan asing ataupun warga negara asing yang melakukan suatu perdagangan bebas dalam wilayah negara dengan barang, jasa dan modal yang dimiliki oleh warga negaranya sendiri.

Oleh karena itu prinsip MFN dan *national treatment* merupakan dasar utama suatu perdagangan bebas dalam ACFTA, karena dengan adanya persamaan perlakuan di bidang perdagangan, maka keadilan dan kepastian akan dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Negara sebagai aktor utama dan individu beserta Perusahaan Multinasional (Transnasional) sebagai aktor lainnya merupakan subjek dari perdagangan bebas. Pada dasarnya GATT, WTO, AFTA dan konvensi internasional merupakan sumber hukum ekonomi internasional, keempat sumber hukum ekonomi internasional tersebut ikut memberikan sumbangan dalam pelaksanaan perdagangan bebas dalam konsep ACFTA ini.

2. Pelaksanaan perdagangan bebas dalam *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) di Indonesia secara regulasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, sebagaimana telah diratifikasi, membentuk peraturan perundangan yang berkaitan dengan ACFTA (Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004), selain itu peraturan-peraturan tersebut berkaitan erat dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berlaku bagi investor asing dan investor dalam negeri. Dalam pelaksanaan ACFTA di Indonesia, perdagangan bebas tersebut akan meningkatkan mutu dan kualitas suatu produk serta terdapatnya daya saing yang sehat antara sesama pelaku usaha dalam melakukan perdagangan terutama dalam kawasan perdagangan bebas. Hal ini tentu saja sesuai dengan prinsip MFN dan prinsip *National Treatment* yang terkandung dalam Hukum Ekonomi Internasional.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) di Indonesia antara lain: Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan ACFTA ini, apakah peraturan yang dikeluarkan tersebut telah sesuai dengan situasi dan kondisi di negara tersebut atau tidak. Kendala selanjutnya adalah subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain, Muatan lokal, Peraturan administrasi dan Peraturan antidumping.

Disharmonisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadapi persaingan global perdagangan bebas. Dalam penerapan Undang-Undang tersebut, ternyata masih terdapat perbedaan

penafsiran sehingga dalam pelaksanaannya terjadi disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Bea Masuk yang masih diberlakukan di seluruh wilayah kesatuan Indonesia termasuk wilayah diluar pabean.

Selain itu adapun kendala-kendala lain yang perlu disikapi oleh pemerintah Indonesia sehubungan dengan Perdagangan bebas dalam *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) adalah tentang kesiapan Indonesia dalam ACFTA ini, terutama dalam meningkatkan daya saing antara produsen lokal dengan barang-barang yang akan masuk dalam kawasan perdagangan bebas. Dengan dibukanya pintu perdagangan bebas versi ACFTA ini, Indonesia diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi investor untuk memasukkan modalnya ke Indonesia.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk memberikan saran yang dirasa berguna bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi yang membaca skripsi ini. Adapun saran-saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah.

1. Agar pelaksanaan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) dapat berjalan efektif, maka PP No.63 Tahun 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Bea Masuk, perlu diselaraskan dengan Undang-

Undang No.44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang. Selain itu, perlunya penerapan aturan yang telah diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta pemberlakuan aturan-aturan hukum yang telah dibuat untuk pelaksanaan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) di Indonesia.

2. Diperlukannya sosialisasi tentang pemahaman perdagangan bebas dalam konsep ACFTA kepada masyarakat khususnya kepada para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang merasa pesimis tentang pemberlakuan perdagangan bebas di Indonesia karena merasa kurang mampu dalam bersaing di bidang perdagangan. Namun justru karena itu, *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional khususnya terkait dalam upaya-upaya peningkatan ekspor, percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan pengembangan sumber daya manusia, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan inovasi dalam produk dan proses produksi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional.
3. Untuk mendukung pelaksanaan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), maka pemerintah diharapkan dapat menyiapkan prasarana yang handal, khususnya prasarana yang terkait dalam melakukan perdagangan bebas. Agar pemerintah dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan sarana pendidikan yang bermutu dan berteknologi tinggi, sehingga dapat

menghasilkan sumber daya manusia yang berkeahlian dan berketerampilan. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan yang lebih intensif dan kondusif terhadap aktifitas perdagangan yang dilaksanakan. khususnya pada kawasan perdagangan bebas, apalagi terhadap arus keluar masuk barang, sehingga dapat mencegah kerugian negara dari upaya penyeludupan barang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Adolf, Huala, A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta 1994.
- Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Anwar, Chairul, *Hukum Perdagangan Internasional*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.
- AK, Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Daliyo, J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Husin, Sukanda, *Hukum Lingkungan Internasional*, CV. Witra Irzani, Riau, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. ALUMNI, Bandung, 2003.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Rosyidah, Rakhmawati, N, *Hukum Ekonomi Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

B. Makalah/Diktat/Karya Tulis:

Narsif, Diktat, *Hukum Ekonomi Internasional*, Unand, Padang, 2008.

Narsif, Diktat, *Hukum Organisasi Internasional*, Unand, Padang, 2008.

Hilman, Diktat, *Hukum Perdata Internasional*, Unand, Padang, 1989.

C. Dokumen:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tanggal 1 September 2000.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.

Persetujuan Tentang Ekonomi Komprehensif perdagangan Barang Antara Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China.

ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) Agreement

ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) Agreement

Vienna Convention tahun 1969 tentang perjanjian internasional

D. Website-Situs Internet:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Zona>, Implementasi Pengaturan AFTA di dalam
Hukum Nasional Indonesia.

<http://id.wikipedia.org>, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara.

<http://h45ibuan.blogspot.com>, Sejarah Berdirinya ASEAN.

www.google.com, Perdagangan Bebas.

www.lontar.ui.ac.id, Perdagangan Bebas Hukum dan Definisi Hukum.

**COMPREHENSIVE ECONOMIC AGREEMENT ON TRADE BETWEEN THE
ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA**

The Government of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Union of Myanmar, Republic of Philippines, Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States Association of Southeast Asian Nations (Collectively, "ASEAN" or "ASEAN Member Countries", or individually, "ASEAN Member State "), and the People's Republic of China (" China ");

RECALLING: the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation (the "Agreement") between ASEAN and China (Collectively, "the Parties", or individually referring to the ASEAN Member Countries or to China as the "Parties") signed by the Heads of Government / Asean Countries Member States and China in Phnom Penh, Cambodia on day-4 November 2002 and the Protocol to change the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation at the Ministry of Economy signed by the Parties in Bali, Indonesia on 6 day of October 2003; further Article 2 (a), 3 (1) and 8 (1) Framework Agreement, Parties that reflect a commitment to establish the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), which covers trade in goods by 2010 for ASEAN 6 and China and 2015 for new ASEAN Member American;

AFFIRMING: The commitment to establish the ASEAN-China Free Trade within the specified time frame, while allowing flexibility to Parties to address their sensitive areas stipulated in the Framework Testament,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Definition

For the purposes of this Agreement, the following definitions shall apply unless the context otherwise requires:

- (a) "WTO" means the World Trade Organization;
- (b) "GATT 1994 " means the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, including Annex I (Notes and Supplementary Provisions);
- (c) "ASEAN 6 " refers to Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand, the Philippines, Singapore and Thailand;
- (d) "ASEAN Member States in the new" refers to Cambodia, Laos, Myanmar and Viet Nam, Myanmar and Viet Nam;
- (e) "applied MFN tariff rates" shall include-quota tariffs, and should:
 - (i) the WTO in the case of ASEAN Member States (the WTO Member since July 1, 2003) and China, see their respective application level as July 1, 2003, and (a non-WTO Member since July 1, 2003), refers to the level applied to China as July 1, 2003;
- (f) "non-tariff measures" shall include non-tariff barriers;
- (g) "AEM" means the Economic Ministers of ASEAN;
- (h) "MOFCOM" means Ministry of Commerce of China;
- (i) "SEOM" means the ASEAN Senior Economic Officials Meeting.

ARTICLE 2

National Treatment on Internal Taxation and Regulation

Each Party shall provide national treatment to products from all the other Persons covered under this Agreement and the Framework Agreement on accordance with Article III of GATT 1994. For this purpose, the provisions Article III of GATT 1994 shall, mutatis mutandis, incorporated into and is an integral part of this Agreement.

ARTICLE 3

Tariff Reduction and Elimination

1. Tariff reduction or elimination program of the Parties shall require the applied MFN tariff rates on listed tariff lines to be gradually reduced and if any, are eliminated, in accordance with this Article.
2. Line tariffs with tariff reduction or elimination program under this Agreement shall cover all tariff lines not covered by Programme under Article 6 of the Framework Agreement, and tariff lines should be considered for tariff reduction and elimination follows:
 - (a) Tariff lines placed in the Normal Track by each Parties accord shall have their respective applied MFN tariff rates gradually reduced and removed in accordance with modalities set out in Annex 1 to this Agreement with aim to achieve the targets set in boundaries therein.
 - (b) Tariff lines placed in the Sensitive Track by Parties accord shall apply their respective MFN tariffs reduced or eliminated in accordance with modalities set out in Annex 2 of this Agreement.
3. In accordance with Annex 1 and Annex 2 of this Agreement, all commitments performed by each Party under this Article shall apply to all other Parties.

ARTICLE 4

Transparency

Article X of GATT 1994 shall, mutatis mutandis, incorporated into and is an integral part of this Agreement.

ARTICLE 5

Rules of Origin

Rules of Origin and Operational Certification Procedures applicable to products covered under this Agreement and the Framework Agreement set out in Appendix 3 of this Agreement.

ARTICLE 6

Modification of Concessions

1. Each party to this Agreement, through negotiation and agreement with each Party which has made a concession under this Agreement, modify or interesting concession was made under this Agreement.
2. In these negotiations and agreements, which may include provisions for adjustment of compensation in connection with other products, the Parties concerned shall maintain the general level of reciprocity and mutual advantageous concessions not less favorable to trade than that provided for in this Agreement prior to such negotiations and agreements.

ARTICLE 7

WTO Disciplines

1. Subject to the provisions of this Agreement and any agreement in the future which may be approved based on a review of this Agreement by the Parties under of this Agreement, the Parties¹ hereby agree and strengthen their commitment to comply with WTO disciplines, between other acts of non-tariff, technical barriers to trade, sanitary and subsidies and countervailing measures, anti-dumping measures and intellectual property rights. dumping measures and intellectual property rights.
2. The provisions of the WTO Multilateral Agreements on Trade in Goods, which is not specifically mentioned in or modified by this Agreement, will applies, mutatis mutandis, to this Agreement unless the context otherwise need.

ARTICLE 8

Quantitative Restrictions and Non-Tariff Barriers

1. Each Party is not doing anything to maintain quantitative restrictions on any time except where permitted under WTO disciplines.
2. The Parties shall identify non-tariff barriers (in addition to quantitative restrictions) for removal as soon as possible after the enactment of this Agreement. The time frame for removal of non-tariff barriers should agreed by all Parties.
3. The Parties shall make their respective quantitative information restrictions available and accessible at the time of execution of this Agreement.

ARTICLE 9

Security Measures

1. Each Party, which is a WTO member, to defend the rights and obligations under Article XIX of GATT 1994 and WTO Agreement on Protection.
2. With regard to the ACFTA security measures, a Party must have the right to perform such acts on the product's transition to The transition to a product must start from the date
force of this Agreement and ending five years from the date completion of tariff elimination / reduction for the product. Non-WTO members of ASEAN shall adhere to the provisions of the WTO in accordance with their commitment to WTO accession. Non-WTO members of ASEAN will phase out quantitative restrictions on them 3 years from the date of entry into force of this Agreement or in accordance with their commitment to WTO accession, whichever comes first.
3. A Party shall be free to take safeguard measures if as an influential ACFTA obligations issued by the Party, including tariff concessions under Program Framework Agreement or this Agreement, or, if as a result of unforeseen developments and the effect of liabilities issued by that Party, including tariff concessions under the Early Harvest Program Framework Agreement or this Agreement, the importation of any

especially products from increasing the other Party in total, absolute or domestic production and, under such conditions that cause or threaten relative to cause serious injury to domestic industry from imports Party that produces like or directly competitive products.

4. If ACFTA precautions taken, the Party taking such measure to increase the tariff rates applicable to the product concerned to the WTO tariff applied to these products at a time when action taken.
5. Any safeguard measure ACFTA May be maintained for an initial period, each ACFTA precautions can be sustained for an initial period of up to 3 years and May be extended for a period not exceeding 1 year. to 3 years and renewable for a period not exceeding 1 year. Notwithstanding the duration of an ACFTA safeguard measure on a product, the duration of an ACFTA Although precautions on the product, Such measure Marshall terminate at the end of the transition period for that action will expire at the end of the transition to it product. Product.
6. ACFTA In applying safeguard measures, the Parties shall adopt regulations for the implementation of security measures as stipulated in the WTO Protection Agreement, with the exception of quantitative restrictions the measures provided for in Article 5 and Article 9, 13 and 14 of the WTO Protection Agreements Thus, all other provisions of the WTO Protection Agreement shall, mutatis mutandis, incorporated into and is an integral part of this Agreement.
7. A ACFTA security measures will not apply to products originating from a Party, during the import share of the product concerned the Party of import does not exceed 3% of total imports from the Parties.
8. In seeking compensation under Article 8 of the WTO Agreement on Protection for ACFTA security measures, the Parties shall request good offices of the body as referred to in paragraph 12 to determine substantially equivalent level of concessions before any delay Any legal proceedings arising from such good offices shall completed within 90 days from the date on which protection ACFTA measure applied.
9. At the Party's termination of employment from a ACFTA precautions on the product, the level of tariffs for products that will be the level which, according to the Party

- tariff reduction and elimination schedule, as set out in Annex 1 and Annex 2 of this Agreement, will apply from 1 January in the year in which security measures stopped.
10. All official communications and documents exchanged between Parties and the entity referred to in paragraph 12 which relates to each ACFTA security measures must be in writing and must be in English.
 11. When applying ACFTA security measures, a Party will not have Simultaneous to the WTO safeguard measures referred to in paragraph 1.
 12. For purposes of this Article, any reference to "Board of Trade Goods "or" Security Committee "in the provisions incorporated from Protection Agreement shall, pending the establishment body fixed under paragraph 1 of Article 16, referring to the AEM-MOFCOM, properly, which must be replaced by a permanent body after its establishment.

ARTICLE 10

Acceleration Commitment

Nothing in this Agreement prohibit parties from negotiating and enter into arrangements to accelerate implementation of commitments made under this Agreement, provided that arrangements are mutually agreed and implemented by all Parties.

ARTICLE 11

Measures to Maintain the Balance of Payments

If a Party in serious balance of payments and external financial difficulties or threat, may, in accordance with GATT 1994 and Understanding of the Balance of Payments Provisions of GATT 1994, adopt measures to restrict imports.

ARTICLE 12

General Exclusions

Subject to the requirement that these measures are not applied in a manner which would be a tool or arbitrary discrimination is justified between the Parties where the same conditions apply, or undercover restrictions on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by the Parties to the action:

- (a) necessary to protect public morals;
- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
- (c) relating to the importation or exportations of gold or silver;
- (d) necessary to ensure compliance with laws or regulations that do not inconsistent with the provisions of this Agreement, including the associated with traditional law enforcement, the enforcement of monopolies operate with paragraph 4 of Article II and Article XVII GATT 1994 patent protection, trademarks and copyrights, and prevention of deceptive practices;
- (e) relating to prison labor products;
- (f) imposed to protect national treasures of artistic, historic or archaeological value;
- (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;
- (h) shall be conducted according to the obligations under any intergovernmental commodity agreements in accordance with criteria presented to the WTO and not rejected by or is itself so submitted and not so rejected;
- (i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure significant amount of these materials into the domestic processing industry during the period when prices of domestic materials held below the world price as part of the government's stabilization plan; Provided that such restrictions will not operate to

increase exports or protection given to industries in the country, and will not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination;

- (j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that every action must be consistent with the principle that all Parties are entitled to a fair share of the international supply of the product, and that any such action, which is inconsistent with other provisions of this Agreement will be stopped immediately after the conditions giving rise to them have ceased to exist. no longer exists.

ARTICLE 13

Security Exceptions

Nothing in this Agreement shall be construed:

- (a) to require each Party to provide any information disclosure is considered contrary to essential security interests;
- (b) to prevent any Party to take measures as may be necessary to protect essential security interests, including but not limited to:
- (i) actions related to the fission material or material from which they originated;
 - (ii) implementing measures relating to traffic in arms, ammunition and war and other goods traffic and such materials are made directly or indirectly for the purpose of supplying the military establishment;
 - (iii) that the actions taken to protect critical communications infrastructure from deliberate attempts intended to disable or degrade such infrastructure;
 - (iv) the measures taken in time of war or other emergency in domestic or international relations; or
- (c) to prevent that Party from taking any actions which, according to obligations under the UN Charter for the maintenance of international peace and security.

ARTICLE 14

Recognition Status of China's Market Economy Status

Each of the ten ASEAN member countries agreed to recognize China as full market economy and does not apply, since the date of signature of this Agreement, Section 15 and 16 of the Protocol of Accession of the People Republic of China to the WTO and Paragraph 242 of Report Working Party on the Accession of China to WTO in relation to trade between China and each of the ten ASEAN member countries.

ARTICLE 15

State and Local Government Area

In fulfilling its obligations and commitments under this Agreement, each Party must ensure their compliance with local and regional governments and authorities in the region as well as their compliance with non-governmental bodies (in the implementation of the powers delegated by central, state, regional or local government or ruler) in its territory.

ARTICLE 16

Institutional arrangements

1. Pending the establishment of a permanent body, AEM-MOFCOM, supported and assisted by SEOM-MOFCOM, shall oversee, supervise, coordinate and review the implementation of this Agreement.
2. The ASEAN Secretariat shall monitor and report to MOFCOM on the implementation of this Agreement. All Parties shall cooperate with the ASEAN Secretariat in carrying out their duties.
3. Each Party shall designate a single point of contact to facilitate communication Between the Parties on any matter Covered by this Agreement. between the Parties on any matter covered by this Agreement. On the request On request of a Party, the contact point of the requested Party Marshall identify to the office or from a Party, the contact point of the requested Party shall identify the office or Responsible for the

official matters and assists in facilitating communication with the officials responsible for the problem and assist in facilitating communication the Requesting Party. Requesting Party.

ARTICLE 17

Review Review

1. The AEM-MOFCOM or Their designated representatives meet Marshall of The AEM MOFCOM or their representatives who are appointed must meet Within a year of the date of entry into force of this Agreement and then within one year from date of entry into force of this Agreement and then Otherwise biennially or as Appropriate to review this Agreement for the every two or proper time to review this Agreement for Further purpose of considering measures to liberalise trade in goods as well as aim of further steps to liberalize trade in goods account and disciplines develop and negotiate agreements on matters Referred to in Article develops discipline and to negotiate agreements on matters referred to in Article 7 of this Agreement or any other relevant matters as May be Agreed. 7 of this Agreement or any other relevant matters agreed.
2. The Parties Marshall, taking into account Their respective experience in the of the Parties shall, taking into account each other's experiences in implementation of this Agreement, review the Sensitive Track in 2008 with a execution of this Agreement, review the Sensitive Track in 2008 with view to Improving the market access conditions of sensitive products, Including a view to improving market access conditions of sensitive products, including Further the possible reduction of the number of products in the Sensitive Track possibility of further reduction of the number of products in the Sensitive Track and the conditions governing the reciprocal tariff rate treatment of products and conditions governing the reciprocal tariff rate treatment of products placed by a Party in the Sensitive Track. placed by a Party in the Sensitive Track.

ARTICLE 18

Annexes and Future Instruments Annexes and Future Instruments

Marshall include this Agreement: This Agreement shall include:

- (a) The Annexes and the contents therein the which Marshall form an integral part of the Annexes and the contents therein to be an integral part of this Agreement: and this Agreement: and
- (b) Agreed all future legal instruments pursuant to this Agreement. all future legal instruments agreed pursuant to this Agreement.

ARTICLE 19

Amendments Changes

This Agreement May be amended by the mutual writtenconsent of the Parties. This Agreement may be amended by writtenconsent with the Parties.

ARTICLE 20

Miscellaneous Provisions

Otherwise except as provided in this Agreement, this Agreement or any action Except as otherwise provided in this Agreement, this Agreement or any action Marshall taken under it not affect or nullify the rights and obligations of a Party that are taken by it shall not affect or negate the rights and obligations of a Party under existing agreements to the which it is a party. under no promise of being a party.

ARTICLE 21

Dispute Settlement

The Agreement on Dispute Settlement Mechanism Between ASEAN and the Agreement on Dispute Settlement Mechanism between ASEAN and Marshall Chinese apply to this Agreement. China will apply to this Agreement.

ARTICLE 22

Depositary

For the ASEAN Member States, this Agreement be deposited with the Marshall For the ASEAN Member Countries, the Agreement must be stored with Secretary-General of ASEAN, WHO Marshall promptly furnish a certified copy of the Secretary-General of ASEAN, which will immediately provide a certified copy thereof, to EACH of ASEAN Member State. that, for each ASEAN member country.

ARTICLE 23

Entry Into Force

1. Marshall this Agreement enter into force on 1 January 2005. This Agreement shall enter into force on January 1, 2005.
2. The Parties undertake to complete the internal Their procedures for the The Parties agree to resolve their internal procedures for entry into force of this Agreement prior to 1 January 2005. Agreement enters into force before January 1, 2005.
3. Where a Party is Unable to complete its internal procedures for the case of a Party is unable to complete the company's internal procedures for entry into force of this Agreement by 1 January 2005, the rights and entry into force of this Agreement by 1 2005, Jan. rights and That Party of obligations under this Agreement commence on the date Marshall of obligations that Party under this Agreement shall commence on the date Such the completion of internal procedures. completion of internal procedures.
4. A Party Marshall upon the completion of its internal procedures for the A Party shall upon the completion of internal procedures for entry into force of this Agreement notify all the other Parties in writing. force of this Agreement notify all other Parties in writing.

IN WITNESS WHEREOF,

the undersigned being duly authorized by Their

IN WITNESS WHEREOF,

the undersigned duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement on Trade in Goods of the Government respectively, have signed this Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's between the Association of Southeast Asian Nations and Peoples Republic of China. Republic of China.

DONE

at, Vientiane, Lao PDR this Twenty Ninth Day of November in the Year DONE at, Vientiane, Lao PDR this Twenty Ninth Day of November in the Year Two Thousand and Four, in duplicate copies in the Home Language. Two Thousand and Four, in duplicate copies in English.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2004

TENTANG

PENGESAHAN *FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLES OF CHINA*
(PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARANEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 4 Nopember 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat China;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINE* (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA).

Pasal 1

Mengesahkan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 4 Nopember 2002, sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat China yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Agreement* dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni
2004

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

MEGAWATI
SOEKARNO PUTRI